



RESEARCH ARTICLE

Hiburan Warga Kota: Bioskop di Semarang Tahun 1950-1964

Putri Nurul Hikmah, Putri Agus Wijayati

Prodi Ilmu Sejarah, FISIP, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: penhahikmah23@gmail.com

To cite this article: Hikmah, P. H., & Wijayati, P. A. (2025). Hiburan warga kota: Bioskop di Semarang tahun 1950-1964. **FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah**, 14(1), 61-76. <https://doi.org/10.17509/factum.v14i1.81267>.

Abstract

At the beginning of the 20th century, movie theaters were still foreign to urban communities in Indonesia. As entertainment, cinemas were only enjoyed by the Dutch and people of upper social status. Thirty years later buildings for cinemas began to be built including City Theater, Oost Java Biosc, Djagalan Bioscoop, Luna Theater and Royal Theater. The existence of these cinema buildings illustrates that cinema is already present in Semarang. This research aims to explain the dynamics of cinemas in Semarang City after the recognition of sovereignty, and the reasons for people watching cinemas, popular genres in 1950-1964, until the 1964 Semarang cinema raid. This research uses the historical method which consists of heuristics, source criticism (verification), interpretation, and historiography. Through historical research, it is known that Semarang City cinemas after the recognition of sovereignty began to develop with the emergence of new cinemas, and the entry of imported films that attracted the attention of the public to come to watch, until the action of boycotting imported films because they were considered to have a bad influence.

Abstrak

Pada awal abad ke-20 bioskop merupakan suatu yang masih asing bagi masyarakat kota di Indonesia. Sebagai hiburan, bioskop hanya dinikmati oleh orang-orang Belanda dan penduduk yang mempunyai status sosial atas. Tiga puluh tahun kemudian bangunan-bangunan untuk bioskop mulai berdiri diantaranya *City Theater*, *Oost Java Biosc*, *Djagalan Bioscoop*, *Luna Theater* dan *Royal Theater*. Keberadaan gedung-gedung bioskop ini menggambarkan bahwa bioskop sudah hadir di Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika bioskop di Kota Semarang pasca pengakuan kedaulatan, dan alasan masyarakat menonton bioskop, ganre yang populer tahun 1950-1964, hingga peristiwa penyerbuan bioskop Semarang tahun 1964. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Melalui penelitian sejarah diketahui bahwa bioskop Kota Semarang pasca pengakuan kedaulatan mulai mengalami perkembangan dengan munculnya bioskop-bioskop baru, dan masuknya film impor yang menarik perhatian masyarakat untuk datang menonton, hingga adanya aksi pemboikotan film impor karena dianggap membawa pengaruh buruk.

Article Info

Article History:
Received 8 March 2025
Revised 1 April 2025
Accepted 25 April 2025
Available online 25 April 2025

Keyword:

Film; Semarang; Theater.

Kata Kunci:

Bioskop; Film, Pemboikotan film; Semarang.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sudah pesat menghadirkan sebuah media hiburan baru bagi masyarakat berupa layanan streaming film seperti Netflix, Disney plus yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Kemudahan yang diperoleh untuk menonton berbagai jenis film yang disediakan di platform tersebut baik film Indonesia maupun film dari luar. Hal ini menjadikan animo masyarakat untuk menonton film di bioskop menjadi berkurang. Dalam artikel yang ditulis oleh Corkery minat untuk pergi ke bioskop tahun 2020 menurun sebagai dampak dari semakin populernya layanan streaming (Corkery, 2024).

Perubahan pada gaya hidup konsumsi masyarakat tahun 2020, terhadap media konvensional ke media digital, mempengaruhi pergeseran minat masyarakat terhadap tayangan film. Menurut Rudi adanya pergeseran dari tayangan konvensional bioskop ke media digital dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti alasan penonton yang dapat melihat dimanapun dan kapanpun tayangan film tanpa perlu untuk datang ke bioskop. Selain itu dengan adanya media digital, penonton lebih leluasa untuk memilih film yang ingin ditonton (Adam, 2022, hlm. 2).

Masa pendudukan Jepang, film cenderung digunakan sebagai media propaganda politik. Pembuatan film pada masa pendudukan Jepang membawa angin segar dalam proses pembuatannya. Meskipun Jepang tidak membawa ahli perfilman tetapi menciptakan pengertian tentang fungsi film yaitu sebagai alat komunikasi Massa yang kemudian digunakan untuk membangun industri Film Nasional di masa kemerdekaan (Fahmi, 2022).

Jika melihat ke belakang kehadiran bioskop bagi masyarakat bukan suatu hal yang baru tetapi sudah ada sejak tahun 1900. Diawali dengan adanya kesenangan menonton film yang dibawa oleh Belanda. Bioskop yang dikenal oleh masyarakat Indonesia awalnya hanya berupa pemutaran gambar *idoep*. Film pertama yang diputar yaitu video rekaman

perjalanan Raja dan Ratu Belanda di Den Haag, film yang diputar masih berupa video monokrom tanpa suara. Bioskop tersebut dimiliki oleh pengusaha Belanda bernama Talbot (Batubara, 2020, hlm. 14).

Dalam perkembangannya sebagai hiburan masyarakat, bioskop mulai berkembang di beberapa wilayah di Jawa. Berawal dari kemunculan bioskop di Jakarta yaitu *The Royal Bioscope*. Selain itu juga dikenal dengan bioskop keliling atau misbar (gerimis bubar) atau disebut juga sebagai layar tancap (Agustin dkk., 2023, hlm. 27–28). Dalam kajian Erwantoro bioskop keliling selain untuk menjangkau penonton dari kalangan umum, juga ditujukan untuk kalangan khusus seperti buruh, romusha, dan anak-anak sekolah (Heru, 2014, hlm. 289). Selain di Jakarta bioskop juga mulai berkembang di Surabaya dengan mulai dibukanya beberapa gedung bioskop. Menurut kajian Wahyu Putri yang meneliti mengenai pasang surut perbioskopian di Surabaya tahun 1950-1985, pada tahun 1950-an di Surabaya terdapat pembagian kelas di bioskop yaitu kelas A dan B. untuk kelas A biasanya untuk film-film Hollywood atau film barat (Putri, 2015, hlm. 550). Sedangkan kelas B untuk film India dan Mandarin. Tingginya minat masyarakat dalam menonton bioskop, menjadikan pemerintah mengambil keputusan untuk membuat gedung bioskop yang permanen terutama pada kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dll (Syafi'i, 2017, hlm. 3–4).

Salah satu kota yang menarik untuk dikaji yaitu Semarang. Modernitas bukan suatu kondisi yang tidak mengenal perbedaan, seperti yang dikatakan oleh Thomas Karsten seorang arsitek perencanaan kota. Tujuan dari perencanaan kota yaitu untuk mengatur keragaman yang diperlukan dari bawaan kondisi perkotaan. Upaya dalam memodernisasi kota tidak hanya pada aspek materilnya tetapi juga pada lingkungan perkotaan yang mempengaruhi perubahan perilaku manusia, hal ini juga termasuk pada gedung bioskop (Colombijn & Coté, 2014, hlm. 10).

Transformasi Semarang dari kota tradisional ke kota modern ditandai oleh perubahan fisik kota. Infrastruktur kota modern Semarang pada awal abad ke-20, ditandai dengan adanya infrastruktur politik, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur budaya. Ruang publik yang merepresentasikan bentuk infrastruktur kota seperti jalan-jalan, pasar, alun-alun, tempat ibadah, dan tempat hiburan seperti bioskop (Wijayati, 2019, hlm. 594)

Sebagai ibu kota, Semarang banyak mengalami pertumbuhan pesat seperti, mulai munculnya tempat hiburan untuk masyarakat. Seperti bioskop yang mulai banyak bermunculan pada awal-awal pasca pengakuan kedaulatan. Sebelum tahun 50-an terdapat beberapa gedung bioskop antara lain, *Metropole*, *Orion*, *Indra*, *Grand*, dll. Bioskop yang muncul pada waktu itu memiliki perbedaan kelas untuk masyarakat. Perbedaan tersebut dibedakan berdasarkan jenis film yang diputar, untuk film Indonesia dan Malaya banyak diputar di bioskop Indra dan Royal, untuk film Amerika diputar di bioskop Grand, sedangkan untuk bioskop lain seperti Rex, Orion, dan Lux tidak memiliki kekhususan mengenai jenis film yang diputar (Jauhari, 1992, hlm. 58).

Penelitian terdahulu mengenai bioskop telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tentang bioskop banyak dikaji secara antropologis, ekonomi, politik, dan Sejarah. Seperti kajian antropologis oleh (Ruppin, 2017) dalam kajian ini menjelaskan penyebab yang mendorong masyarakat di Jawa untuk menonton dan menghabiskan waktu luangnya di bioskop dengan film-film yang mereka tonton, dan bagaimana pemisahan kelas-kelas penonton yang berbeda diatur, terkadang juga dilanggar di berbagai tempat yang menayangkan film. Perspektif historis (Jauhari, 1992; Tjasmani, 2008; Huzelmi dkk., 2022; Fahmi & Aji, 2022; Adiatama, 2022; Syafi'i, 2017; Prameswari dkk., 2022; Arief, 2019) menjelaskan tentang sejarah masuknya bioskop ke Indonesia hingga perkembangannya

dibeberapa daerah yang ada di Indonesia serta pasang surut produksi film di Indonesia

Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang bioskop di Kota Semarang pada tahun 1950-1964 yang belum dibahas pada penelitian sebelumnya. Di penelitian sebelumnya hanya menjelaskan tentang bioskop Kota Semarang tahun 1980 hingga 1990-an secara singkat dan belum mendalam. Penelitian ini menjelaskan bagaimana dinamika bioskop di Kota Semarang pasca pengakuan kedaulatan, genre yang populer ditayangkan bioskop pada tahun 1950-1964, alasan masyarakat menonton dan bagaimana peristiwa penyerbuan gedung bioskop di Kota Semarang pada tahun 1964 yang dilakukan oleh pemuda pemudi Semarang untuk melayangkan protes terhadap penayangan film-film impor. Penelitian sejarah yang dilakukan penulis menjadi sumbangsih dan kontribusi tentang sejarah film maupun budaya populer masa kolonial sampai dengan kemerdekaan. Sehingga bisa menjadi rujukan dari peneliti yang lain akan budaya populer bioskop atau layar tancap yang ada pada masa kolonial maupun kemerdekaan.

METODE

Sebagai sebuah ilmu, sejarah terikat dengan prosedur penelitian ilmiah. Metode penelitian sejarah merupakan proses menguji serta menganalisa secara kritis rekaman yang berasal dari pengalaman masa lampau (Gootschalk, 1975, hlm. 32; Wijayati, 2009, hlm. 69). Sejarah memiliki metode penelitian sendiri yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sebelum menulis sejarah, seorang peneliti hendaknya menentukan topik penelitian terlebih dahulu. Pemilihan topik ini sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional atau kedekatan intelektual (Kuntowijoyo, 2013, hlm. 70).

Penelitian ini mengambil cakupan temporal tahun 1950-1964. Diawali tahun 1950 karena pada tahun ini bioskop mulai bermunculan di kota-kota diberangi dengan berdirinya Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia). Tahun

1964 sebagai akhir batas penelitian karena pada tahun ini terjadi aksi boikot film Amerika. Berkaitan pada jenis dan metode pengumpulan data yang digunakan, sumber primer yang telah diperoleh dalam penelitian ini berupa arsip dan surat kabar. Arsip yang digunakan yaitu Inventaris Arsip Tektual Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra) 1963-1966, yang didalamnya terdapat arsip tentang berkas peristiwa penyerbuan beberapa gedung Bioskop di Kota Semarang 20-26 Maret 1964, surat dari ketua DFI kepada wakil menteri pertama bidang khusus mengenai resolusi dari pemuda rakyat Kota Semarang tentang pembubaran DFI. Sedangkan dalam surat kabar sezaman seperti *De locomotief* terbitan tahun 1940, 1949, 1951, 1953, 1954, dan 1955. *De Vrijf Pers* 1954, *Java Bode* 1953, *Suara Merdeka* terbitan tahun 1953 hingga 1957, dan *Kedaulatan Rakyat* terbitan tahun 1964.

Setelah memperoleh sumber langkah selanjutnya melakukan verifikasi terhadap data primer maupun sekunder dengan dua cara yaitu kritik eksternal dan internal. Setelah itu melakukan interpretasi dengan menafsirkan data-data yang telah diperoleh. Fakta-fakta yang masih terpecah dan acak disatukan menjadi suatu kesatuan sehingga menjadi utuh mengenai bioskop di Kota Semarang tahun 1950-1964. Tahapan yang terakhir dalam metode penelitian sejarah yaitu historiografi, dengan menuliskan fakta-fakta yang telah diperoleh dari data menjadi suatu tulisan sejarah yang kronologis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Gambar *Idoep* hingga Sinematografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bioskop merupakan pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar yang disorot sehingga dapat bergerak. Bioskop sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *bios* yang berarti hidup dan *skopion* yang berarti melihat. Bioskop mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1900-an yang dibawa oleh bangsa Eropa yang

pernah menduduki Indonesia. Bangsa Eropa memperkenalkan kegemaran menonton bioskop sebagai hiburan masyarakat. bioskop menjadi salah satu tempat terjadinya interaksi antar manusia yang sedang menonton. Interaksi merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa terjadinya interaksi tidak ada kehidupan bersama (Soekanto & Sulistyowati, 2013, hlm. 151).

Munculnya pertunjukan berupa gambar hidup membawa kegembiraan tersendiri bagi beberapa kalangan yang ingin mengetahui hal tersebut. Tetapi pada saat pemutaran perdana dari gambar hidup sudah dikenakan tarif yang cukup tinggi, sehingga antusiasme terhadap pemutaran film jadi menurun. Karena hal tersebut, pada tahun 1901 pemilik dari tempat pertunjukan membuat kebijakan dengan menurunkan harga karcis. Kebijakan ini berhasil menarik kembali minat masyarakat untuk menonton, hingga mulai muncul bioskop-bioskop yang lain (Danishya, 2021, hlm. 4).

Pada awal kemunculan bioskop, film yang ditayangkan masih berupa kumpulan gambar-gambar bergerak yang disatukan dan belum bersuara, masyarakat menyebutnya dengan istilah gambar *idoep*. Dari penayangan film ini mendapat antusias yang besar karena masyarakat belum pernah menonton hal tersebut. Hiburan yang ada waktu itu yaitu panggung teater atau dikenal dengan komedi stambul ada juga yang menyebutnya dengan *toneel* melayu. Adanya penayangan film yang fenomenal ini mulai mendorong munculnya bioskop di beberapa tempat. Pada awalnya gedung bioskop yang digunakan untuk menayangkan film masih sangat sederhana. Mulanya film yang dipertontonkan adalah perjalanan Sri Baginda Maharatu Belanda bersama dengan Yang Mulia Hertog Hendrik pada saat memasuki Den Haag. Kemudian berkembang ditayangkannya film-film dokumenter dari kejadian-kejadian di Eropa dan Afrika Selatan. Untuk dapat menonton film tersebut penonton diharuskan membeli

karcis. Harga karcis untuk kelas satu sebesar f.2, untuk kelas dua f.1, dan untuk kelas tiga sebesar f. 0,50. Bioskop bukanlah hiburan yang murah, mengingat masyarakat pribumi masih hidup dengan sangat sederhana (Tjasmani, 2008, hlm. 6).

Berdirinya bioskop merupakan suatu tontonan yang mewah dan bergengsi, karena penontonnya yang terbatas hanya orang-orang Eropa, Tionghoa, dan pribumi yang memiliki uang seperti golongan priyayi dan ningrat. Selain itu, pada masa kolonial Hindia Belanda di dalam bioskop terdapat pembagian kelas yang tercipta karena adanya pengaruh ras. Adanya pembagian kelas ini bermanfaat untuk memperoleh penonton untuk pergi ke bioskop.

Dasar penentuan golongan bioskop tersebut didasarkan pada struktur penyusunan tanda harga masuk. Karena dengan tarif masuk yang berbeda, masyarakat pada masa Hindia Belanda dapat menerima keberadaan bioskop. Pada waktu itu berlaku empat golongan strata masyarakat yaitu: *Pertama*, masyarakat Eropa yaitu orang-orang Belanda dan ras berkulit putih murni yang datang dari Eropa yang disebut dengan warga kelas satu. *Kedua*, masyarakat Timur Asing yaitu pendatang dari timur seperti India, Jepang, Tionghoa dan lain-lain kecuali Arab termasuk dalam golongan warga kelas kedua. *Ketiga*, masyarakat Indo-Belanda yang disebut sebagai warga kelas tiga. *Keempat*, golongan masyarakat pribumi yang disebut sebagai warga kelas empat (Tjasmani, 2008, hlm. 7).



Gambar 1. Bioskop Luna Semarang

Sumber: wereldmuseum.nl

Hiburan masyarakat Kota Semarang sejak dahulu yang populer yaitu nonton bioskop atau dikenal juga dengan “Gambar Hidup”. Bioskop mulai masuk ke Semarang pada tahun 1930. Di Jawa Tengah pada tahun 1936 sudah terdapat bioskop sebanyak 21 yang tersebar di beberapa daerah, seperti Solo, Ambarawa, Magelang, Salatiga, Kudus, Klaten, Pati, Pekalongan, Kendal, Tegal. Dari beberapa daerah tersebut Semarang merupakan daerah yang memiliki bioskop paling banyak di Jawa Tengah.

Pada tahun 1933 Semarang memiliki gedung bioskop baru yang bernama Tjandi Theater, pada saat pembukaan mendapatkan animo yang besar dari masyarakat, juga dihadiri oleh gubernur Jawa Tengah, Residen, dan Wali Kota Semarang. Bioskop ini berada di aula taman kota yang telah sepenuhnya direnovasi dan dioperasikan oleh perusahaan gabungan dari Tiongkok milik Liem Khoen Hwan. Sebelum adanya *Tjandi Theater* Semarang sudah memiliki bioskop yaitu bioskop Luna yang berada di Djomblang (*Het/ Nieuws van den dag voor Nederlandsch-indie*, 2 Juni 1933).

Tabel 1. Daftar Bioskop Semarang Tahun 1936

| Nama Bioskop | Nama Pemilik |
|-------------------|-----------------|
| City Theater | Liem Khoen Hwan |
| Oost Java Biosc | W. Apple |
| Djagalan Bioscoop | A.E. Iazare |
| Royal Theater | Liem Khoen Goan |

Sumber: Tjasmani, 2008.

Setelah tahun 1930, film yang diputar di bioskop mulai bersuara. Kemunculan ini menambah antusias masyarakat untuk menonton di bioskop. Popularitas film bicara meningkatkan jumlah penonton. Bioskop-bioskop baru juga dibangun dilengkapi dengan peralatan untuk suara. Film juga dijadikan sebagai media untuk menyebarkan informasi dan propaganda, terutama pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan.

Pada saat Jepang menduduki Indonesia bioskop mengalami kemerosotan. Saat Jepang

memegang kekuasaan semua studio film milik Cina ditutup kecuali studio milik Belanda yaitu multi film. Jepang menutup studio-studio film tersebut karena, supaya tidak digunakan untuk membuat film yang anti Jepang, kemudian Jepang tidak memiliki kepercayaan terhadap produser film orang Cina yang budayannya dianggap tidak menentu, yang bisa memahami perjuangan Dai Toa (Biran, 2009, hlm. 332). Jepang mendirikan perusahaan yang memonopoli distribusi film yang di ketuai oleh Nechi'ei, badan usaha tersebut bernama *Eiga Haikyusha* dan perusahaan produksi film Nippon Eiga yang dipimpin oleh Bunjin Kurata seorang sutradara film. Pada 1 April 1943 mendirikan sebuah pusat kebudayaan yaitu *Keimin Bunka Shidoso*. Badan yang dibentuk oleh Jepang tersebut dimaksudkan sebagai tempat bagi para peminat pada empat bidang kesenian, yaitu lukis, ukir, kesenian, dan kesusteraan yang melaksanakan kebijakan berdasarkan pada undang-undang perfilman Jepang (*Eiga Ho*) (Budiarto, 2021, hlm. 49).

Setelah Jepang pergi dari Indonesia. Pada dasawarsa 1950-an diberbagai daerah termasuk Semarang ditandai dengan mulai bangkit kembalinya gedung-gedung bioskop. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu, pertama dengan munculnya persatuan pengedar film seperti IPEFI (Ikatan Pengedar Film Indonesia) yang berdiri pada 19 Februari 1953 yang diketuai oleh Mr Liem Tong. Dan faktor kedua yaitu munculnya perusahaan-perusahaan film yang didirikan oleh orang pribumi seperti Haji Umar Ismail dan Jamaludin Malik (Jauhari, 1992, hlm. 52-53).

Pada tahun 1953 di Indonesia terdapat 513 bioskop yang tersebar di berbagai daerah. Bioskop-bioskop tersebut mayoritas dimiliki oleh warga non pribumi. Di Semarang hampir seluruh bioskop yang beroperasi juga di miliki oleh warga non pribumi. Bioskop yang ada pada periode ini terdapat pembagian kelas yang didasarkan pada jenis film yang diputar. Pada bioskop kelas dua film yang ditayangkan umumnya adalah film dengan kualitas dibawah

bioskop kelas satu, atau film yang sudah lama. Selain itu faktor penentuan kelas pada bioskop juga didasarkan kemegahan dan fasilitas yang dimiliki (Jauhari, 1992, hlm. 57).

Pada tahun 1955, di Semarang terdapat beberapa bioskop yang kelasnya susah untuk dibedakan. Yang membedakan kelas tersebut hanya pada jenis film yang ditayangkan saja. Bioskop Indra dan Royal banyak menayangkan film Malaya dan Indonesia, sedangkan untuk film Amerika banyak ditayangkan di bioskop Grand. Untuk bioskop lain seperti *Lux*, *Orion*, dan *Rex* tidak memiliki kekhususan untuk jenis film yang ditayangkan.

Layar Perak Semarang Tahun 1950-1964

Pada awal pengakuan kedaulatan bioskop mulai kembali eksis setelah sebelumnya mengalami keterpurukan pada masa pendudukan Jepang. Karena pada saat itu banyak bioskop digunakan sebagai media penyebaran propaganda Jepang. Sebelum tahun 50-an di Semarang sudah ada beberapa gedung bioskop yang terkenal seperti *Pathe Theater* yang berubah nama menjadi *Royal Theater*. Bioskop tersebut berada di Jalan Bojong (sekarang Jalan Pemuda) gedung ini memiliki interior yang bagus, karena pada awalnya gedung ini digunakan untuk pertunjukan *Opera*. Oleh karena itu, didalamnya terdapat fasilitas balkon yang mengitari setengah ruangan. Selain itu, di Jalan Gajahmada berdiri gedung bioskop yang bernama *Rex Theater*, dan bioskop *Lux Theater* (Tio, 2000, hlm. 53).

Bioskop-bioskop tersebut sempat memiliki kejayaan pada masanya. Pada tahun 1950-an di Semarang sudah mulai banyak bermunculan gedung bioskop dengan bangunan dan fasilitas yang lebih bagus. Seperti yang termuat dalam surat kabar *De Locomotif* disebutkan bahwa, Semarang memiliki bioskop baru yang hampir selesai dibangun di Karangturi milik kerajaan *Royal-City-Roxy*. Setahun kemudian di kawasan Seteran dibangun bioskop yang lebih besar yang diberi nama bioskop Garuda.

Peletakan batu pertama dalam pembangunan bioskop ini dilakukan oleh Kolonel Gatot Subroto yang disaksikan oleh berbagai pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Acara ini diadakan oleh Tuan Tan Hong Hie selaku direktur bioskop Garuda. Bahkan dalam sumber yang sama disebut sebagai bangunan bioskop terbesar di kota ini. Bangunan ini menampung kapasitas antara 1.100 hingga 1.200 kursi, Bioskop ini dibangun dengan tiga lantai yang diberi menara runcing yang terdapat nama bioskop. Bioskop ini menjadi bangunan megah yang menghiasi kota (*De Locomotief*, 6 November 1951).

Pembangunan gedung bioskop ini menghabiskan biaya sekitar satu setengah juta rupiah, yang sebagian dialokasikan untuk penelitian tanah, karena tanah yang digunakan untuk pembangunan, berada di seberang bioskop *Lux*. Tanah tersebut sedikit berawarawa, sehingga untuk bangunan yang besar membutuhkan fondasi yang kuat. Sebuah restoran juga dibangun di sebelah bioskop, yang terletak di lantai pertama sebelum pintu masuk. Bioskop ini diperkirakan dibuka untuk umum dalam waktu tujuh bulan kedepan. Dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena kesulitan dalam memperoleh bahan bangunan mempengaruhi lamanya waktu dalam pembangunan. Desain gedung bioskop ini dirancang oleh arsitek asal Jakarta bernama Liem Bwan Tjie, yang juga merancang stadion Ikada.

Tabel 2. Bioskop Populer Tahun 1950-1964

| Nama Bioskop | Tempat |
|------------------------|-------------------|
| Orion (Rahayu) | Aloon-aloon Barat |
| GRIS (Metropole) | Jalan Pemuda |
| Gelora (Grand Theater) | Jalan MT. Haryono |
| Jagalan | Jalan Jagalan |
| Semarang Theater | Jalan Pemuda |

Di *aloon-aloon* Semarang terdapat bioskop yang sangat terkenal yaitu Orion Theater yang terletak di sebelah masjid besar Jl. Kauman.

Bioskop tersebut kemudian berganti nama menjadi Rahayu Theater. Di Jalan MT.Haryono juga terdapat beberapa bioskop yang terkenal di kalangan masyarakat Kota Semarang seperti *Grand Theater*, gedung ini berada di tanah milik Tuan Be Biau. Di belakang gedung bioskop *Grand* juga terdapat bioskop yang berdiri yaitu Indra Theater.

Di daerah Pecinan juga terdapat dua gedung bioskop yang terkenal yaitu, *Roxy Theater* yang terletak di Gang Besen dan bioskop Djagalan Theater yang terletak di jalan Djagalan. Kedua bioskop tersebut sering menayangkan film-film Mandarin dan India. Di kompleks gedung Gris yang terletak di Jalan Bojong (yang kini Jalan Pemuda) terdapat gedung bioskop yang bernama *Metropole Theater* yang kemudian berubah nama menjadi bioskop GRIS. Warga Semarang pernah hidup di masa ini masih banyak yang bisa mengingat, bahwa dahulu di sekitar gedung-gedung bioskop tersebut banyak dipenuhi oleh calo-calo karcis, terutama pada saat film-film yang ditayangkan bagus (Tio, 2000, hlm. 53).



Gambar 2. Bioskop Orion Semarang

Sumber: Semarang Tempo Dulu

Berkembangnya bioskop di Semarang ditandai dengan mulai banyak iklan yang dimuat dalam surat kabar untuk mempromosikan bioskop dan film kepada masyarakat. Iklan surat kabar *Suara Merdeka* 21 Agustus 1953 berbunyi:

“Mestinja pada tgl. 20/21 Agst. malam di Progo diadakan pertundjukan bioskoop oleh Djawatan Penerangan Kota Semarang. Sekalipun rakjat dari Kp. Pemali, Progo,

Tjitarum sudah menunggu², ternyata pertunjukan pun tidak terjadi. Menurut keterangan dari panitia penyelenggara, hal demikian tadi di sebabkan, karena kachilafan dari pihak yang bersangkutan dan selanjutnya dapat dikabarkan, bahwa pertunjukan tsb. akan diadakan pada tgl. 21 malam 22 Agst. djam 8 malam.”

Dalam perkembangannya bioskop Semarang mengalami berbagai persoalan yang terjadi seperti adanya pemogokan buruh bioskop yang mengakibatkan tidak adanya penayangan film selama beberapa hari. Pemogokan ini terjadi pada 28 Mei 1953 dimana para pekerja di bioskop *Metropole*, *Djagalan*, *Rex*, dan *Orion* yang tergabung dalam Sarbufi (Sarekat Buruh Film Indonesia) melakukan aksi pemogokan kerja pada hari itu. Pemogokan ini disebabkan karena keterlambatan pemberian bonus para pekerja oleh pihak pengusaha bioskop. Karena dari pihak pengusaha mengatakan jika bekerja lebih dari tujuh jam di hari biasanya bekerja, jam tambahan tersebut akan dibayar dan tidak dihitung sebagai lembur. Akibat dari pemogokan pekerja tersebut pertunjukan bioskop pada hari itu tidak jadi ditayangkan (*De Locomotief*, 28 Mei 1953). Tidak lama masalah pemogokan buruh bioskop *Rex*, *Orion*, dan *Metropole* tersebut sudah sampai pada tahap penyelesaian. Sehingga dari pihak direksi bioskop memberi keterangan bahwa pada hari jumat yang akan datang bioskop-bioskop tersebut sudah mulai menayangkan film seperti biasa. Pada malam pertama penayangan di Bioskop Rex akan diputar film *Military Policeman* dengan *Bob Hope da Micky Rooney*. Sedangkan di bioskop Orion dan *Metropole* secara bersamaan akan memutar film *Accross the wild Missouri* dengan Ricardo Montalban dan CI, cable film berwarna.

Persoalan lain yang dihadapi yaitu kenaikan pajak untuk bioskop. Kenaikan tersebut dibahas dalam sidang DPRDS Kota Semarang yang memutuskan untuk menaikkan pajak tontonan bioskop yang semula 30% menjadi 40%. Akan

tetapi keputusan tersebut belum dilaksanakan dan masih menunggu pengesahan lebih lanjut oleh pihak atasan. Respon para pengusaha bioskop terhadap kebijakan tersebut mereka mengambil sikap “*wait and see*”. Kenaikan pajak ini memang dapat dilakukan, tetapi dengan adanya kenaikan tersebut tarif bioskop juga akan dinaikan. Karena tarif yang berlaku pada tahun 50-an ditetapkan berdasarkan dari kantor pengendalian harga pusat di Jakarta. Semarang jika dibandingkan dengan kota lain seperti Jakarta atau Bandung sangat berbeda. Di kota-kota tersebut pertunjukan bioskop diputar hingga lima kali dalam waktu 24 jam sedangkan di Semarang paling banyak hanya tiga kali pertunjukan, jika buruh pekerjanya tidak bersikap anti kerja lembur (*Suara Merdeka*, 19 Maret 1953). Persoalan lain yang dihadapi perbioskopian di Semarang yaitu adanya para catut karcis bioskop yang seringkali menjual harga karcis dengan harga yang lebih tinggi.

Perkembangan bioskop di Semarang sejalan dengan perkembangan bioskop nasional. Munculnya bioskop-bioskop di Semarang tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat Kota Semarang. Perubahan modernitas kota yang tidak ingin tertinggal oleh kota yang lain. Seorang yang merasa bosan dengan hiburan tradisi maka akan mencari alternatif baru dengan datang ke bioskop untuk mencari hiburan baru (Luwes, 2010, hlm. 80–81). Pada tahun 1950-an ditandai dengan bergantinya nama-nama bioskop di Kota Semarang, yang sebelumnya kental dengan nama kolonial di ganti dengan nama yang lebih Indonesia. Beberapa bioskop yang mengalami nasionalisasi yaitu *Oost Java Bioscoop* menjadi bioskop *GRIS*, *Royal Theater* berubah menjadi Semarang Theater, dan *Djalalan Theater* menjadi bioskop *Jagalan* (Fitriani, 2017, hlm. 85–86).

Bioskop *Metropole* yang bertempat disebagian ruangan gedung *GRIS* di Bodjong, dalam waktu lima bulan akan dibeli oleh yayasan gedung *GRIS*. Untuk membeli bioskop

ini, Walikota Hadisubeno selaku ketua yayasan mengajukan peminjaman uang sebesar Rp. 400.000 kepada Bank Industri Negara di Jakarta. Setelah bioskop itu dibeli, maka akan lebih mengutamakan pemutaran film-film produksi dalam negeri dan film dari negara-negara Asia. Setelah dibeli oleh yayasan GRIS, pada 20 Mei 1954 dengan dihadiri berbagai pejabat di Semarang diadakan upacara peresmian dan pergantian nama gedung bioskop Metropole menjadi gedung bioskop GRIS. Maksud dari ketua yayasan GRIS Mohamad a.l pergantian nama gedung ini untuk mengisi hari Kebangkitan Nasional (Suara Merdeka, 21 Mei 1954).

Untuk meningkatkan kenyamanan, bioskop di Semarang mulai menerapkan sistem karcis yang disesuaikan dengan nomor kursi yang sudah tersedia di dalam ruangan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah penonton yang terpaksa harus melihat film sambil berdiri karena kekurangan tempat duduk. Kebijakan ini diambil dalam suatu pertemuan antara pengusaha bioskop, pihak kepolisian, dan tentara yang berada dibawah kepemimpinan Walikota Semarang. Ketentuan lain yang disepakati dalam pertemuan tersebut yaitu penonton dilarang merokok di dalam ruangan bioskop (Suara Merdeka, 26 Juni 1954).

Seiring berkembangnya teknologi bioskop di Semarang dan Indonesia. Beberapa bioskop yang ada di Kota akan dilengkapi dengan sistem Cinemascope alat ini digunakan untuk memperbagus pertunjukan film. Dengan digunakannya alat baru ini, bioskop harus memiliki sebuah layar putih yang besar dan luas dengan dilengkapi suatu lensa dan penguat suara. Adanya peralatan yang lebih modern, maka penonton yang duduk paling jauh dapat menyaksikan film dengan lebih jelas, seakan-akan penonton tersebut duduk ditengah-tengah.

Walikota Semarang Hadisubeno Sosrowerdojo, mengeluarkan peraturan yang membatasi pemutaran film di bioskop pada siang hari, kecuali hari minggu dan libur (*De*

Locomotief, 24 Januari 1955). Hal ini karena minat untuk pergi ke bioskop lebih banyak pada malam hari, hal ini diungkap oleh Tarsicius Sudarisman karena para pegawai baru bisa menonton setelah pulang kerja pada malam hari. Walaupun dengan harga karcis yang lebih mahal dibanding siang hari.

3. Genre Film yang Diputar Bioskop

Film sebagai karya seni merupakan media hiburan dalam bentuk audio visual. Namun film bukan hanya sekedar produk hiburan semata, tetapi juga sebagai produk budaya karena film menggambarkan realitas kehidupan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, secara tidak langsung film dapat menggambarkan identitas suatu bangsa (Herlinawati dkk., 2020, hlm. 1)

Genre dalam film dapat diartikan sebagai klasifikasi atau jenis dari sekelompok film yang memiliki pola atau karakter seperti setting, subjek cerita, isi, tema, atruktur cerita, periode, gaya, situasi, aksi atau peristiwa, ikon, mood, dan karakter. Berdasarkan klasifikasi tersebut menghasilkan genre-genre film yang populer seperti drama, petualangan, komedi, horror, western, romans, thriller, dan sebagainya. Dengan adanya genre dalam sebuah film memberikan gambaran umum terhadap penonton tentang film apa yang akan mereka saksikan (Rizky & Stellarosa, 2019, hlm. 20–21).

Pada era 1950-an hingga awal 1960-an, bioskop di Indonesia termasuk Semarang didominasi oleh film impor dibanding film nasional. Jumlah film impor semakin meningkat setelah hadirnya IPEFI (Ikatan Penedar Film Indonesia) pada tahun 1953 yang diketuai oleh Mr. Liem Tong Kiat. Setelah adanya organisasi tersebut impor film mulai ditangani secara serius bahkan volume film yang masuk ke Indonesia semakin besar.

Dominasi film impor yang masuk pada periode 1950-an menjadikan pasar film dalam negeri tahun 1953 mengalami kemunduran dan semakin terpojok. Saingan utama bagi film Indonesia pada saat itu adalah film Malaya

dengan genre komedi yang dibintangi oleh P.Ramlee komedian ternama yang begitu diminati di Indonesia. Selain itu, film India juga mendapat tempat di hati masyarakat dan dunia perfilman. Selama periode ini serbuan akan film-film impor yang datang dari Amerika Serikat juga menjadikan industri film dalam negeri merasa semakin tersaingi. Hal ini dikarenakan kualitas film-film impor dari Amerika Serikat lebih bagus dari segi gambar dan penyajian cerita yang menarik dibanding film Indonesia (Fahmi & Aji, 2022, hlm. 7).

Meskipun film impor mendominasi bioskop, namun tetap diimbangi dengan produksi film dalam negeri yang masih eksis menghiasi layar bioskop. Sehingga bioskop-bioskop yang sebelumnya beralih fungsi, menjadi aktif kembali. Namun hal tersebut tergantung pada kondisi gedung, lokasi, dan jenis film yang ditayangkan. Trend film yang berkembang pada periode 1950-1964 berhubungan erat dengan jiwa zaman pada saat itu, film-film Indonesia yang diproduksi banyak menampilkan muatan sejarah yang dikemas dalam berbagai genre seperti musical, komedi, peperangan, genre drama, dan lainnya (Adelia, 2021, hlm. 83).

Pergeseran selera masyarakat terhadap jenis film impor dibandingkan dengan film nasional, menjadikan bioskop-bioskop di Semarang ramai didatangi penonton jika yang diputar film China dan India. Begitu juga dengan penayangan film-film dari Amerika Serikat yang begitu diminati. Pada tahun 1950-1960-an genre film yang paling populer yaitu film drama, romance, petualangan, musical, dan lainnya. Film bergenre drama menjadi film yang disukai oleh masyarakat karena alur cerita yang menarik dan penuh emosi. Pada saat itu film nasional yang populer seperti film *Darah dan Doa* (1950), *Sedap Malam* (1951), *Pagar Kawat Berduri* (1961), dan *Lewat Djam Malam* (1954), film-film ini umumnya mengangkat tema perjuangan kemerdekaan, cinta dan keluarga. Selain drama, film komedi juga sangat digemari karena menghibur dan membuat penonton tertawa. Film yang populer seperti *Bapak*

Kumpul (1954) dan *Tiga Dara* (1956), film-film komedi tersebut memiliki cerita yang ringan sehingga tidak membuat penonton berfikir keras tentang alur ceritanya. Kemudian juga terdapat genre film aksi yang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat pada saat itu. Film-film aksi biasanya menampilkan adegan perkelahian yang seru dan menegangkan. Film yang populer seperti, *Pendekar Bambu Runcing* (1959) dan *Si Pitung* (1952) (Fahmi & Aji, 2022, hlm. 5).

Selain ketiga genre yang telah disebutkan, film-film dengan genre lain seperti musical juga diproduksi pada era tersebut. Namun tidak terdapat informasi yang menyebutkan bahwa genre tersebut menjadi favorit masyarakat pada saat itu. Film Indonesia belum mampu untuk bersaing dengan film luar yang banyak mendapatkan hati penonton. Hampir seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang pada periode 1950-1964 pernah menyaksikan film di bioskop. Masyarakat dengan keadaan ekonomi yang baik biasanya menonton di bioskop kelas A yang menayangkan film-film barat.

Pada periode ini, bioskop-bioskop di Semarang banyak menayangkan film-film impor. Surat Kabar menjadi media untuk mempromosikan film tersebut. Seperti yang termuat dalam *De Locomotief*, bahwa pada hari minggu sore bioskop akan menayangkan film *Barbe Bleue*, yang diputar di bioskop Orion. Selain film impor yang lebih banyak ditayangkan dalam bioskop di Semarang, film nasional juga tetap menghiasi layar bioskop, walaupun minat penonton terhadap film tersebut tidak sebanyak film luar (*De Locomotief*, 29 Juni 1953).

Film impor yang banyak digemari pada periode 1950-1964, seperti *Military Policemen*, *Texas Carnival*, *Chungkuo Cha Chi Choan*, *Thian Tang Mei Nu*, *Across the wide Missouri*, *Guilty Love*, *Untamed Woman*, dan lain sebagainya. Film-film yang ditayangkan di bioskop ada yang sudah berwarna dan belum berwarna (hitam putih).

Film impor dari Amerika Serikat dan Eropa diputar di bioskop kelas I dan II, untuk film-film Jepang, Cina, dan film Asia lainnya kebanyakan diputar di bioskop kelas II, sedangkan film Indonesia berada di bioskop kelas bawah (Yusa Biran, 2009). Sejak dahulu pasar film Indonesia merupakan bioskop kelas bawah, pada awal tahun 1950 juga terdapat penonton kelas menengah dan anak sekolah yang mau menonton karena masih euforia awal kemerdekaan, serta upaya untuk membuat film yang berisi. Namun karena kualitas cerita dan teknik pembuatannya masih belum juga memenuhi ukuran yang digunakan kalangan menengah atas. Sebab itu penonton kalangan menengah tidak terlalu tertarik untuk menonton film Indonesia.

4. Menikmati Waktu Luang di Bioskop

Mendatangi bioskop merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat, saat masih terbatasnya pilihan hiburan selain penampilan kesenian atau pertunjukan tradisional. Belum adanya saluran televisi pada periode 50-an dan layanan digital streaming membuat bioskop menjadi pilihan untuk menikmati film (Efrianto, 2019, hlm. 104).

Pada periode ini film sudah dinikmati dengan tenang oleh masyarakat, karena pemilik bioskop mengusahakan melalui berbagai cara untuk menarik penonton datang ke bioskop. Upaya yang dilakukan dengan membuat selebaran kemudian dibagikan kepada pengunjung di pasar, membuat poster-poster yang dipasang pada pusat keramaian. Yang tidak kalah menarik yaitu iklan-iklan pada surat kabar tentang film-film yang akan diputar di bioskop (Wawancara, Tarsicius Sudarisman 25 Februari 2025).

Adanya iklan tersebut sukses menarik minat masyarakat untuk pergi ke bioskop. Maka tidak mengherankan pada tahun 1950-an bioskop menjadi hiburan utama bagi masyarakat, karena pada masa ini hiburan yang ada masih terbatas belum ada televisi atau radio. Menonton film seringkali menjadi kegiatan sosial, berkumpulnya orang-orang untuk dapat menikmati hiburan

di bioskop (Fitriani, 2017, hlm. 71). Film-film baru yang ditayangkan di bioskop menjadi daya tarik bagi masyarakat, karena keinginan untuk menjadi orang pertama yang menonton. Hal ini mendorong banyaknya orang untuk pergi ke bioskop, terutama jika film yang akan ditayangkan baru dan menarik bagi mereka.

Film-film yang ditayangkan memiliki pasarnya masing-masing bagi penikmatnya. Bioskop kelas A biasanya menayangkan film unggulan, yang identik dengan harga tiket yang lebih mahal. Penikmat bioskop golongan satu mayoritas orang-orang Tionghoa. Sedangkan untuk kalangan menengah kebawah, cenderung lebih memilih bioskop kelas B karena harga masuknya yang lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa bioskop dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan menyesuaikan harga tiket bioskop. Film yang ditayangkan biasanya Melayu, Mandarin, India, dan film nasional. Bagi kalangan ini menonton film hanya sekedar untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari (Fitriani, 2017, hlm. 70).

Sebagai hiburan masyarakat Kota Semarang, bioskop kemudian menjadi bagian dari budaya urban. Dalam kurun waktu beberapa tahun bioskop menjadi suatu komoditi perdagangan yang menjanjikan. Penduduk kota yang lebih menyukai dan menerima sesuatu yang bersifat populer, hal ini membuat pemerintah kota melihat perlu tindakan untuk memenuhi animo masyarakat yang menyukai hiburan. Hingga akhirnya mulai bermunculan bioskop di pinggiran, menengah, sampai tengah kota.

5. Pemboikotan Film-film Impor Tahun 1964

Ibarat suatu buku dan musik, film sesekali dianggap sebagai pembawa pengaruh buruk terhadap penontonya. Karena berbagai alasan, film terkadang diboikot dan dilarang untuk ditayangkan oleh instansi pemerintah atau sebagian masyarakat yang kontra terhadap suatu film.

Dalam kurun waktu 1950-1964 di bioskop Semarang maupun nasional banyak beredar

film dari luar. Arus film impor dipasar Indonesia jumlahnya lebih mendominasi dibandingkan dengan film Indonesia sendiri. Banyaknya film impor yang masuk ke Indonesia menjadikan film Indonesia semakin tersaingi, negara yang paling banyak mengimpor ke Indonesia adalah Amerika.

Dilihat dari tahun 1950-1955 film yang sudah masuk ke Indonesia sebanyak 12.066 hal ini berbanding jauh dengan Indonesia di rentang tahun yang sama hanya ada 272 film. Film-film impor yang masuk tersebut lebih banyak mendominasi bioskop-bioskop yang ada (Huzelmi dkk., 2022, hlm. 260).

Film impor yang masuk ke Indonesia memiliki daya tarik bagi penonton dan dinantikan untuk penayangannya. Bahkan film impor Amerika memiliki lembaga yang mengatur distribusi filmnya di Indonesia, lembaga tersebut bernama AMPAI (*American Motion Picture Association of Indonesia*). AMPAI juga melengkapi peralatan pada bioskop-bioskop yang ada di Indonesia termasuk Semarang yang sebelumnya belum lengkap. Peralatan tersebut seperti sinemaskop yang di berikan kepada bioskop kelas satu yang lebih banyak diisi oleh kaum elit dan menengah saja. Karena mereka lebih menyukai film-film impor dibandingkan dengan film nasional. Film nasional juga berusaha untuk bisa ditayangkan di bioskop kelas satu, akan tetapi penonton bioskop kelas satu menganggap film nasional rendah.

Semakin banyaknya film impor yang masuk ke Indonesia dan menjadikan film nasional kurang memiliki pasar dalam selera masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dimaksudkan sebagai usaha untuk memajukan perfilman nasional. Kebijakan yang diambil yaitu dengan menutup akses film impor untuk masuk ke dalam negeri. Selain itu film impor juga dianggap dapat membawa pengaruh buruk kepada masyarakat, karena dalam iklan yang terdapat dalam surat kabar sering kali menampilkan poster adegan-adegan yang tidak ada didalam film yang diputar karena

telah dipotong oleh panitia sensor film, hal ini membuat geram panitia sensor film.

Seperti yang termuat dalam surat kabar Suara Merdeka, Nj. Mr. Maria Ulfa selaku ketua panitia sensor film menyampaikan lewat surat edaran yang diberikan kepada semua importir dan produser film yang dimaksudkan supaya mereka dimasa yang akan datang tidak lagi menyampaikan kepada para pengusaha bioskop untuk memperlihatkan kepada masyarakat umum poster-poster mengenai adegan-adegan yang tidak terdapat di dalam film yang ditayangkan untuk umum. Surat edaran tersebut disampaikan sehubungan seringkali terjadi bahwa pengusaha-pengusaha bioskop menunjukan kepada masyarakat umum mengenai adegan-adegan yang ada di dalam film dalam bentuk poster-poster, sedangkan didalam filmnya sendiri adegan-adegan yang bersangkutan sudah dipotong oleh panitia sensor film. Selain itu juga terdapat poster-poster yang gambarnya tidak ada sama sekali adegan di dalam film yang disampaikan kepada panitia sensor film (Suara Merdeka, 3 Februari 1954).

Maraknya persebaran film impor pemerintah mengambil kebijakan dengan menutup akses film impor ke Indonesia. Sebelum adanya kebijakan tersebut, sempat terjadi protes oleh para senimawan maupun masyarakat untuk menutup bioskop-bioskop yang masih menayangkan film-film impor. Aksi tersebut dilanjutkan dengan pemboikotan film Amerika, yang kemudian dibentuk suatu lembaga panitia aksi pemboikotan film imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS).

Adanya aksi boikot film impor Amerika dan Malaysia tidak terlepas adanya konflik luar negeri Indonesia dengan Malaysia. Konflik tersebut disebabkan oleh pembentukan federasi Malaysia yang ingin menggabungkan wilayah kawasan melayu, yaitu Malaysia, Singapuram Sarawak, Brunai dan Sabah. Presiden Soekarno menganggap Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris atau Barat, yang dianggap sebagi bentuk Neocolonialisme (Nur & Ravico,

2021, hlm. 28). Kebudayaan atau kesenian imperialisme dianggap sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia, film-film yang diimpor dari negara imperialisme membawa akibat yang buruk, meracuni jiwa dan pikiran dari generasi muda. Film yang beredar banyak yang berjenis vulgar, bandit, dan merusak moral lainnya.

Oleh kaum imperialisme Amerika Serikat digunakan untuk melancarkan agresinya dikalangan kebudayaan, dengan film-film mereka merusak ideologi kaum buruh dan rakyat beserta pemudanya hingga melupakan sifat-sifat nasionalismenya. Untuk mencegah beredarnya film yang merusak moral pemuda dari pengaruh Imperialisme, Neo Kolonialisme dan sisa-sisa Feodalisme. Maka dibentuk panitia sensor film yang diketuai oleh Nj. Utami Surjadarma.

Aksi protes terhadap film-film impor terjadi di beberapa bioskop. Terjadi pada 17 Maret 1964 yang pertama didatangi ialah bioskop Sri yang terletak di Jalan Gajah Mada didatangi dan diserbu oleh kurang lebih 100 orang pemuda/pemudi mereka berteriak "Ganyang Malaysia, Ganyang Armada ke VII A.S, Boikot film A.S" mereka berteriak sambil mencorat-coret dinding dengan tulisan serupa yang mereka teriakan. Selain itu, mereka juga merampas film Niuwsreel milik H.G.M. No. 757 A dan 758 B yang telah diputar di Kota Semarang sejak 12 Maret 1964. Selain di bioskop Sri mereka juga melakukan hal serupa di bioskop Gelora bahkan lebih parah lagi mereka merobek-robek foto dan reklame bioskop yang dipasang didepan gedung tersebut, serta memecahkan kaca-kaca pintu masuk.

Mereka mendesak pemerintah untuk membubarkan Dewan Film Nasional yang tidak demokratis, dan membentuk kembali Dewan Film Nasional yang lebih demokratis dan refresentatif, serta mencerminkan gotong royong nasional berporoskan Nasakom. Merubah politik impor film atau menutup pintu terhadap film-film yang datang dari

negara-negara Imperialisme termasuk dari Malaysia Neokolonialisme. Sebaliknya harus mendatangkan film dari negara baru yang sedang tumbuh dan anti imperialisme dan kolonialisme.

KESIMPULAN

Bioskop Kota Semarang pada tahun 1950-1964, tidak hanya menjadi sumber hiburan yang populer dikalangan Masyarakat. Industri bioskop di Semarang mengalami perkembangan yang pesat pada periode ini, ditandai dengan munculnya bioskop-bioskop baru yang memiliki fasilitas yang lebih modern dan beragam. Selain berfungsi sebagai tempat hiburan, bioskop juga menjadi ruang publik, diimana Masyarakat dapat berinteraksi, bertukar informasi, dan memperluas wawasan. Bioskop-bioskop di Semarang pada tahun 1950-1964 didominasi oleh film-film impor, terutama Amerika Serikat. Meski begitu, film nasional juga tetap menghiasi layar bioskop walaupun Masyarakat tidak seantusias untuk menonton film luar. Genre film yang diputar di bioskop juga beragam seperti drama, aksi, musical, dll. Dominasi film impor juga membawa pengaruh terhadap nilai-nilai, gaya hidup, dan budaya yang berbeda. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dan tanggapan dari Masyarakat, termasuk munculnya Gerakan pemboikotan film impor yang dianggap membawa pengaruh buruk.

Urgensi dan kontribusi penelitian ini ialah semakin memperkaya sejarah budaya populer yang ada pada masa kolonial maupun sampai dengan masa kemerdekaan. Bioskop ialah salah satu sarana hiburan masyarakat maupun propaganda pemerintah soal sosial maupun politik. Sehingga dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa bioskop bukan hanya soal hiburan semata tetapi juga alat propaganda pemerintah dan gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat menengah atas (*elite*) khususnya pada bioskop tertentu pada masa kolonial maupun kemerdekaan. Hal ini menimbulkan

kelas sosial baru yang diakibatkan oleh munculnya budaya populer tersebut.

REFERENSI

- Adam, R. (2022). *Dampak pergeseran tayangan film di Indonesia terhadap audiens (studi kasus pergeseran tayangan film bioskop menjadi format web series di media online pada masyarakat kota Kediri)*. Institut Agama Islam Tribakti Kediri.
- Adelia, R. (2021). *Genre perfilman di Indonesia tahun 1950-1965*. Universitas Lampung.
- Adiatama, M. R. (2022). Bioskop dan masyarakat kota Palu, 1950-1998. *Manaqib*, 1(1), 57–75.
- Agus Wijayati, P. (2009). *Research arsip dan bahan pustaka*. Unesa University Perss.
- Agustin, N., Ismawati, D. A., & Fauziah, M. (2023). Membuka pintu hiburan di era kolonial: sejarah perkembangan bioskop di Batavia, 1900-1942. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1), 27–37. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1816>.
- ANRI. *Kementrian kompartimen hubungan dengan rakyat (menko hubra) 1963- 1966*.
- Arief, C. (2019). Matinya bioskop lokal (studi kasus bioskop permata, Yogyakarta 1970-1990). *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 8(2), 125–144.
- Batubara, T. (2020). Memutar sejarah “gambar idoeop” masa silam: industri perfilman dan dampaknya di medan pada era kolonial Belanda sampai orde baru. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1(1), 14–19. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i1.165>.
- Barbe Bleue, *De Locomotief* 29 Juni 1953.
- Biran, M. Y. (2009). *Sejarah film 1900-1950: bikin film di Jawa*. Komunitas Bambu.
- Budiarto, G. (2021). Media poster dan film sebagai instrumen propaganda militer Jepang di Indonesia 1942-1945. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 11(1), 35. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6206>.
- Bioscoopgebouw Grand, *De Locomotief*, 21 Februari 1940.
- Bioskop Gris, *Suara Merdeka*, 21 Mei 1954.
- Bioscoop- staking in Semarang, *De Vrijf Pers: ochtendbulletin*, 26 Januari 1954.
- Bioskop Metropole” Akan Dibeli Oleh Jajasan Gris?, *Suara Merdeka* 29 Januari 1954.
- Bioskop Semarang Akan Diperlengkapi Dengan Cinemascope, *Suara Merdeka*, 25 Januari 1954.
- City Concern Cinemas, *Suara Merdeka*, 19 Maret 1954.
- Colombijn, F., & Coté, J. (2014). Modernization of the Indonesian city, 1920-1960. *Brill*, 1–351. <https://doi.org/10.1163/9789004280724>
- Corkery, C. (2024). *Tren: dari bioskop hingga Netflix: Layanan Streaming Akan Tetap Ada*. *The Dartmouth*. <https://www.thedartmouth.com/article/2022/10/trends-streaming-services>
- Danishya, D. D. (2021). *Pasang surut bioskop di Jakarta 1950-1986*. Universitas Negeri Jakarta.
- Efrianto, E. (2019). Perkembangan bioskop di kota Prabumulih 1950 – 2000. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 5(1). <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i1.36>
- Fahmi, M. F. Y., & Aji, R. N. B. (2022). Dinamika Perfilman Indonesia tahun 1940-1966. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 12(3).
- Fitriani, A. D. (2017). *Perkembangan bioskop di kota Semarang tahun 1980-1998*. Universitas Negeri Semarang.
- Geen bioscoopvoorstel-lingen in Semarang, *Java-bode*, 29 Mei 1953.
- Herlinawati, Ulumudin, I., Fujianita, S., & Widiputera, F. (2020). *Persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia*. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian

- dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>.
- Heru, E. (2014). Bioskop keliling peranannya dalam memasyarakatkan film nasional. *Patanjala*, 6(2), 285–300.
- Huzelmi, M., Erawati, M., & Yulia, R. (2022). Perfilman di Indonesia tahun 1950-1965. 7(2), 257–265.
- Ide Untuk Menaikan Kartjis Bioskoop, *Suara Merdeka*, 27 Maret 1956.
- Intenfiskan aksi pemboikotan film imperialis AS, *Kedaulatan Rakyat*, 30 Mei 1964.
- Jauhari, H. (1992). *Layar perak 90 tahun bioskop di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartjis Bioskoop akan diberi Nomer, *Suara Merdeka*, Sabtu 26 Juni 1954
- Kartjis Bioskop kan Naik? Dapatkan Harga Kartjis Sekarang Ini Dipertahankan, *Suara Merdeka*, Kamis 19 Maret 1953.
- Luwes, U. H. G. (2010). *Sejarah perkembangan bioskop di surakarta*. Universitas Sebelas Maret.
- Nieuwe Bioscoop te Semarang, *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 02 Juni 1933.
- Nieuwe bioscoop Garuda Reuzen- theater voor Semarang, *De Locomotief*, 06 November 1951
- Nur, C., & Ravico. (2021). *Situasi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966*. *Danandyaksa Historica*, 1(1).
- O.P.S. Bioskop Swasta Kota Semarang Mempersembahkan hari ini, *Suara Merdeka*, Senin 13 Mei 1963.
- Pembuatan Slides Bioskoop Dg Teknikolor Film, *Suara Merdeka*, 07 Februari 1956.
- Pemogokan Buruh Bioskop Selesai Rex, Metropole dan Orion putar film lagi, *Suara Merdeka*, Kamis 28 Januari 1954.
- Pemutaran Film, *Suara Merdeka*, 29 Januari 1954 “Djangan Memperlihatkan Poster2 Adegan2 jg Tidak Terdapat dlm Film Jang Diputar”, *Suara Merdeka*, Selasa 3 Februari 1954.
- Pertundjukan Bioskoop, *Suara Merdeka*, Jumat 21 Agustus 1953.
- Pramesti, W. (2023). Media streaming digital, alternatif ruang tayang film. *IKONIK : Jurnal Seni dan Desain*, 5(1), 52. <https://doi.org/10.51804/ijds.v5i1.2060>
- Prameswari, A. K. D., Jauhari, N., & Leksana, G. (2022). Praktik percaloan tiket film di Bioskop Surabaya tahun 1950-an - 1970-an. *Historiography*, 2(3), 310. <https://doi.org/10.17977/um081v2i32022p310-322>
- Putri, H. W. A. W. (2015). Perkembangan bioskop di surabaya tahun 1950 – 1985. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(3), 487–494.
- Rizky, M. Y., & Stellarosa, Y. (2019). Preferensi penonton terhadap film Indonesia. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.37535/101004120172>
- Ruppin, D. (2017). The emergence of a modern audience for cinema in colonial Java. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 173(4), 475–502. <https://doi.org/10.1163/22134379-17304014>
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, R. A. (2017). *Dinamika perbioskopian kota magelang masa kolonial hingga kemerdekaan tahun 1920-1960*. Semantic Scholar.
- Tio, J. (2000). *Kota semarang dalam kenangan* (Cetakan Ke). Sinar Indonesia.
- Tjasmani, HM. J. (2008). *100 Tahun sejarah bioskop di Indonesia*. PT.Megindo Tunggal Sejahtera.
- Wijayati, P. A. (2019). Kekerasan dan kriminalitas di kota semarang: antara negara kolonial dan otoritas lokal. *Jurnal Al-Qalam*, 25(3), 591–602.

Yusa Biran, M. (2009). *Peran pemuda dalam kebangkitan film indonesia*. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. **Wawancara** Bapak Tarcisius Sudarisman, 25 Februari 2025.